

Konsep yang Terus Dibentuk

Dalam kesederajatan

Dalam pidato utama pada pembukaan simposium Parsudi Suparlan mengingatkan pada cita-cita reformasi untuk membangun Indonesia Baru berupa sebuah masyarakat sipil demokratis, dengan tegaknya hukum untuk keadilan, pemerintah yang bersih, terwujudnya keteraturan sosial dan rasa aman dalam masyarakat yang menjamin produktivitas warga masyarakat, dan kehidupan ekonomi yang menyajahterakan rakyat Indonesia. "Bangunan Indonesia Baru itu adalah sebuah masyarakat multikultural Indonesia, hasil reformasi dan perombakan tatanan kehidupan Orde Baru yang bercorak masyarakat majemuk," kata dia.

Kalau selama puluhan tahun corak masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika adalah keanekaragaman suku-bangsa, sudah saatnya corak masyarakat Indonesia menjadi keanekaragaman kebudayaan yang ada.

Konsep multikulturalisme tidak dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, kata Suparlan, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman budaya dalam kesederajatan. Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengangguk perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan.

Antropolog UI itu beranggapan proses reformasi dengan cita-cita Indonesia Baru yang sekarang tampaknya mengalami kemacetan itu sebaiknya digulirkan kembali. Alat penggulir bagi proses-proses reformasi sebaiknya secara model dapat dioperasionalkan dan dimonitor, yaitu mengaktifkan model multikulturalisme untuk meninggalkan masyarakat majemuk dan secara bertahap memasuki masyarakat multikultural Indonesia.

Bila pengguliran proses-proses reformasi yang terpusat pada terbentuknya masyarakat multikultural Indonesia itu berhasil, maka tahap berikutnya adalah mengisi struktur-struktur atau pranata-pranata dan organisasi-organisasi so-

sial yang tercakup dalam masyarakat Indonesia. Isi dari struktur-struktur atau pranata-pranata sosial tersebut mencakup reformasi dan pembenahan dalam kebudayaan-kebudayaan yang ada, dalam nilai-nilai budaya dan etos, etika, serta pembenahan dalam hukum dan penegakan hukum bagi keadilan. "Dalam upaya ini harus dipikirkan adanya ruang-ruang fisik dan budaya bagi keanekaragaman kebudayaan yang ada pada tingkat lokal maupun nasional dan berbagai corak dinamikanya," kata Suparlan.

Upaya ini dapat dimulai dengan pembuatan pedoman etika dan pembakuannya sebagai acuan bertindak sesuai dengan adab dan moral dalam berbagai interaksi yang terserap dalam hak dan kewajiban dari para pelakunya. Pedoman etika ini akan membantu upaya-upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) secara hukum, kata dia.

Perluasan ruang publik, ruang sosial yang memungkinkan tampilnya ekspresi-ekspresi kebudayaan juga disebutkan oleh Irwan Abdullah dalam kaitannya dengan desentralisasi. Proses desentralisasi yang sedang terjadi sekarang sebenarnya mengharuskan redefinisi terhadap sistem politik secara keseluruhan, karena kalau tidak, maka itu hanya akan memindahkan masalah-masalah diversitas kebudayaan, bukan memecahkannya.

"Desentralisasi tidak dengan sendirinya menyebabkan terbukanya ruang-ruang yang lebih luas atau lebih longgar bagi diversitas kebudayaan. Diversitas kebudayaan baru bisa mendapat tempat kalau desentralisasi juga berarti perluasan dari ruang publik, ruang sosial yang memungkinkan tampilnya ekspresi-ekspresi kebudayaan," kata Abdullah. Masyarakatlah yang harus mendefinisikan ruang politik macam apa yang diinginkan supaya diferensiasi atau diversitas kebudayaan bisa mempunyai tempat.

Menurut dia multikulturalisme mengharuskan kita mendefinisikan ulang dua hal, yaitu konsep kewargaan dalam pengertian posisi individu dalam komunitas (hubungan hori-

zontal) dan konsep kewarganegaraan yaitu posisi warganegara dalam sebuah negara (hubungan vertikal). Konsep kewarganegaraan sekarang ini menjadi konsep yang sangat penting untuk dipertanyakan karena selama ini hak-hak masyarakat sebagai warganegara, seperti misalnya hak untuk mengekspresikan keragaman kebudayaannya, sama sekali tidak jelas.

Irwan Abdullah yang memberi kesimpulan sementara simposium pada acara penutupan bersama Yando Zakaria itu mengatakan yang bisa dipetik dari simposium empat hari itu adalah suatu proses pembelajaran bersama yang harus dilakukan kalau mau menciptakan suatu masyarakat multikultural. Pembelajaran ini dari masyarakat untuk interaksi-interaksi berbagai kekuatan yang ada, juga pembelajaran pada tingkat pemerintah.

Dalam proses pembelajaran bagi para peserta yang datang tidak hanya dari disiplin ilmu antropologi, namun juga dari dari berbagai disiplin ilmu lainnya seperti sosiologi, sejarah, hukum, ekonomi, komunikasi dan kajian jender itulah dibicarakan berbagai topik yang sangat beragam. Keberagaman peserta itu terlihat dari 25 panel yang ada, yang antara lain adalah Dimensi Transnasional Transformasi Indonesia, Pendidikan Multikultural, Pusat dan Periferi dan Pembentukan Kulturalitas di Indonesia, Wanita Indonesia dalam Masyarakat Multikultural, Masalah Tanah dan Diversitas Kebudayaan di Indonesia, dan Bagaimana Indonesia Timur Mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika.

Begitu beragamnya topik itu mencerminkan begitu beragamnya masalah yang dihadapi dalam upaya mencapai masyarakat multikultural. Seperti harapan Yunita Winarto, pemimpin redaksi jurnal terbitan jurusan Antropologi Universitas Indonesia itu, mudah-mudahan semangat meneliti dan mengkaji terwujudnya suatu kehidupan bersama yang harmonis, tanpa kecurigaan, tanpa kedengkian, dalam keragaman dan perbedaan itu dapat memancar luas ke seluruh negeri. (DI)